

INTISARI

Pembangunan desa menentukan besarnya kekuatan ekonomi bangsa. Namun, program pembangunan dari pemerintah daerah sering kali kurang sesuai dengan karakteristik desa sehingga pemerintah menetapkan UU Desa dan menyalurkan dana desa dengan tujuan menciptakan kemandirian desa. Pada tahun 2020, Kementerian Desa merumuskan SDGs Desa supaya program pembangunan memiliki target yang jelas dan mampu mendukung tercapainya SDGs Nasional. Desa Ponggok dipilih karena sukses dalam pemberdayaan masyarakat dan mampu memperoleh PADes sebesar 1,7 miliar pada tahun 2018 sehingga dapat mengimplementasikan berbagai inovasi yang mendukung perwujudan SDGs. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan kegiatan pembangunan Desa Ponggok terhadap ketercapaian SDGs Desa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deduktif kualitatif dengan mengaitkan indikator SDGs Desa dan teori faktor-faktor pengaruh implementasi kebijakan. Analisis keterkaitan dilakukan terhadap kegiatan pembangunan yang memperoleh pendanaan dari APBDes Ponggok tahun 2021 dan dilengkapi dengan kegiatan desa yang menggunakan anggaran lain serta program pembangunan dari pemerintah supradesa.

Hasil yang ditemukan yaitu seluruh kegiatan pembangunan Desa Ponggok telah selaras dengan indikator SDGs Desa. Namun, masih terdapat sembilan indikator yang belum terwujudkan dan belum optimal. Faktor penghambat ketercapaian indikator yang menjadi kewenangan pemerintah desa yaitu adanya keterbatasan terkait kapasitas SDM dalam memanfaatkan peluang dan kurangnya kepedulian pemuda terhadap pembangunan desa. Sementara, faktor yang menghambat perwujudan indikator yang menjadi kewenangan di luar pemerintah desa yaitu kegiatan memerlukan perencanaan yang kompleks dan koordinasi dengan banyak pihak, kebutuhan masyarakat yang belum memenuhi kriteria, serta keterbatasan anggaran desa.

Kata Kunci: Desa Ponggok, pembangunan berkelanjutan, SDGs Desa

ABSTRACT

Rural development determines the strength of the nation's economy. However, development programs from the local government are often not by village characteristics, so the government establishes the Village Law and distributes village funds to create village independence. In 2020, the Ministry of Villages formulates Village SDGs so that development programs have clear targets and can support the achievement of National SDGs. Ponggok Village was chosen because of its success in empowering the community and being able to obtain PADes of 1.7 billion in 2018 so that it can implement various innovations that support the realization of the SDGs. Therefore, this study aims to analyze the alignment of Ponggok Village development activities with the achievement of Village SDGs and identify the factors that influence its implementation.

This research was conducted using a qualitative deductive method by linking the Village SDGs indicators and the theory of factors influencing policy implementation. A linkage analysis was carried out on development activities that received funding from the 2021 Ponggok APBDes and were complemented by village activities that used other budgets and development programs from the supra-village government.

The results were that all Ponggok Village development activities aligned with the Village SDGs indicators. However, nine indicators still have not been realized and are not optimal. The inhibiting factors for the achievement of indicators under the village government's authority are limitations related to human resource capacity in taking advantage of opportunities and the lack of youth concern for village development. Meanwhile, the factors hindering the realization of indicators that become authorities outside the village government are activities that require complex planning and coordination with many parties, community needs that do not meet the criteria, and limited village budgets.

Keywords: Ponggok Village, sustainable development, Village SDGs